ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN PADA BUMDES SAKATO DITINJAU DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

(Studi Kasus : BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading Kota Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan Perkuliahan Guna Memperoleh

Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi Islam (SE)

OLEH:

Andri Yaldi
NIM: 3717.018

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2020/2021

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANDRI YALDI
Nim	: 3717018
Tempat/tgl lahir	: Jakarta, 11 Agustus 1998
Fakultas Prodi	: FEBI SI Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading Kota Pariaman)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Oktober 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Andri Yaldi

3717018

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Berdasarkan hasil telaah dari Dosen Pendamping Akademik dan Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah,maka proposal skripsi ini berjudul **"Kontibusi BUMDEs SAKATO Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Perspektf Ekonomi Islam (Studi Kasus : BUMDEs Sakato di Desa Punggung Lading Kota Pariaman "** yang disusun oleh :

Nama : Andri Yaldi

NIM : 3717018

Prodi : Manajemen Bisnis Syariah

Telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan sebagai sebuah Penelitian/Skripsi/TA

Untuk proses kelanjutan skripsi ini, mohon kesediaan ibuk untuk menyetujui sebagai dosen pembimbing skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan.

Bukittinggi, 03 November 2020
Pembimbing



Hj. Zulhelmi, MM
NIP/NIDN: 196404222014112001

Halaman Persembahan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillahhirobbil Alamin.....

Tiada kata yang indah selain mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Mu ya Allah SWT. Segala kekuatan yang engkau berikan kepada hamba Mu ini, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia yang engkau berikan kepada hamba sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beriringan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Rasulullah Muhammad SAW.

Ibunda dan Ayahanda....

Saya persembahkan karya sederhana saya ini untuk kedua orang tua saya yang menyayangi saya dan mendidik saya sampai saat ini Ibunda saya Yunisma dan Ayahanda Anwar Rasyid Chaniago. Sebagai tanda berbakti saya kepada keduanya dan rasa hormat saya kepada mereka, terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya sederhana saya ini untuk ibunda dan ayahanda saya, yang selalu memberi saya nasehat dan yang selalu mengingatkan saya akan pentingnya menuntut ilmu, terimakasih yang sangat besar saya ucapkan kepada orang tua saya yang paling hebat .

Saudara kandungku....

Teruntuk ketiga saudara perempuan saya, terimakasih atas segala perhatian yang membuat selalu bersemangat dalam membuat karya sederhana ini, tanpa kalian bertiga rumah terasa sepi, terimakasih atas segalanya dan sangat spesial terimakasih untuk Kakak Fitri Nanda Sari A.Md,. Par dan Kakak Era Fatika Sari yang selalu menambahkan segala keperluan yang diperlukan dari awal kuliah sampai detik ini. Dan tidak lupa terimkasih kepada adik saudara perempuanku Indah Ramadhanti saudara paling bungsu di keluarga kecil tercinta. Dan tak lupa pula Abang Ipar bang Dodi telah member semangat dan dukungan kepada saya selama pengerjaan skripsi ini.

Sahabat-Sahabatku....

Teruntuk sahabat saya yang paling berterimakasih telah membantu dan membina saya dalam pengerjaan skripsi ini Bang Fajar Restu Amami SE, Syukron Habibie SE, Sugara Hadi Pranata SE dan Bang Riki Primadana SE yang banyak menyumbangkan ilmu-ilmu nya ke saya. Sahabat saya yang berada di Aceh, Kabupaten Gayo Lues yaitu Jupri, Doni Aramiko, Yahya, Fajri Ariga, Saleh Andrian dan yang tak bisa saya ucapkan satu per satu terimakasih telah menjadi bagian dari sahabat selama kita berada dalam Sekolah Menengah Atas sampai saat sekarang ini. Sahabat saya yang ada suka dan duka terutama Happy Family kepada Riva Novita Sukrina Putri SE, Wulandari Juita SE, Annisa Hasiatul Jannah SE, Ferri Andani SE dan Zulfikri SE terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku selama ini. Dan tak lupa pula sahabat di luar jurusan kepada Rico Sumantri, Nicko Ivannov Harvard,

Muhammad Ridwan, Ceprianto, Muhammad Irfan, Yogi Pratama dan Ahmad Subeir terimakasih untuk empat setengah tahun berjuang bersama untuk mendapatkan gelar SE suka duka bersama kalian takkan pernah terlupakan dan terimakasih atas segala bantuan yang dikeluarkan dalam pembuatan karya sederhana ini. Dan terimakasih untuk kelas MBS-A 2017

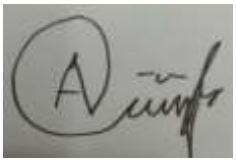
Teruntuk semua yang menanyakan kapan wisuda...

Terimakasih sudah selalu menanyakan kapan,kapan dan kapan wisuda. Kata-kata itu yang membuat karya sederhana ini selesai. Ditunggu diwisuda ya

Hanya sebuah karya sederhana yang saya berikan kepada kalian semua, terimakasih saya ucapkan atas segala kekhilafan dan kekurangan

Kurendahkan hati serta menjabat tangan meminta beribu-ribu maaf yang tercurahkan Skripsi ini kupersambahkan.

Created by : 27 September 2021



Andri Yaldi

ABSTRAK

Skripsi ini di susun oleh **ANDRI YALDI, NIM 3717018**, Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan judul **"Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading Kota Pariaman)"**

Latar Belakang penelitian ini adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang berada di BUMDes Sakato yang belum dilaksanakan secara maksimal. Maka dalam penelitian ini diharapkan BUMDes Sakato dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemennya dengan lebih baik agar bisa mewujudkan tujuan BUMDes Sakato seperti menambah omset penjualan yang dilakukan oleh BUMDes Sakato dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di desa Punggung Lading. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (studi kasus lapangan) melalui pendekatan kualitatif. Informan kunci penelitian ini adalah pemimpin BUMDes, pengurus BUMDes, Kepala Desa dan pengurus Kantor Desa Punggung Lading dengan menggunakan metode teknik field research (Studi Kasus Lapangan).

Hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen pada BUMDes Sakato memerlukan adanya peningkatan pada masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama, perencanaan (*planning*) BUMDes belum berjalan secara efektif dikarenakan dana dari BUMDes belum cair oleh pemerintah desa dimana dua unit usaha yang belum bisa dilaksanakan. Kemudian adanya terjadi permasalahan pada kinerja masing-masing pewngurus di BUMDes Sakato. Kedua, Penggorganisasian (*organizing*) di BUMDes Sakato struktur organisasi nya masih belum kompleks dikarenakan pembagian divisi kerja masih tergolong cukup sederhana yang mana pada strtuktur organisasi nya belum ada pembagian manajemen seperti pemasaran, produksi dan Hubungan Masyarakat berada di BUMDes Sakato. Ketiga, Kepemimpinan (*Actuating*) di BUMDes Sakato masih ada berbagai kekurangan terutama dalam penerapan dan pelaksanaan strategi-strategi, terutama dalam pengurusan kepegawaian dimana banyak pengurus yang masih belum disiplin. Dan masih ada konflik internal sesama pegawai yang berada di BUMDes. Keempat, Pengevaluasian (*Controlling*) di BUMDes Sakato setelah dilakukan evaluasi ialah cepat melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh BUMDes sehingga perencanaan dan tujuan BUMDes dapat terlaksana dan tercapai. Kelima, pada Q.S As-Saff ayat 4 dapat kita pahami bahwa manajemen merupakan hal yang sangat penting sebelum memulai suatu kegiatan dan Allah menyukai segala sesuatu yang teratur dan terencana sedangkan pada BUMDes Sakato manajemennya masih belum dikelola secara maksimal dan masih terjadi beberapa kesalahan-kesalahan.

Kata Kunci: Analisis, Implementasi Manajemen, Manajemen Bisnis Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, tak ada satupun nikmatnya yang dapat didustakan. Salah satunya dengan selesainya penulisan skripsi ini, serta pendidikan penulis pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Shalawat serta salam kemuliaan tak lupa pula dimohonkan pada Allah SWT untuk disampaikan kepada junjungan umat yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil meletakkan panji-panji keislaman dan seberkas cahaya iman, sehingga ajaran beliau telah mampu mengangkat derajat manusia dari kehinaan kepada martabat yang setinggi-tingginya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Bukittinggi Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** beserta Wakil Rektor 1 Bapak **Asyari, S.Ag, M.Si,** Wakil Rektor 2 Bapak Novi **Hendri, M.Ag**, dan Wakil Rektor 3 Bapak **Dr.Miswardi, M.Hum** yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi serta membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** beserta Wakil Dekan 1 Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** Wakil Dekan 2 Ibu **Dra. Rusyaida D, M.Ag** dan Wakil Dekan 3 Bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum** yang telah membantu proses perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Ketua Jurusan S1 Manajemen Bisnis Syariah Ibu **Yenty Astarie Dewi, SE., MM** yang telah membatu penulis selama di perguruan tinggi hingga dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
4. Ibu **Hj. Zulhelmi, SE., MM** selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga perkuliahan di IAIN Bukittinggi.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Manajemen Bisnis Syariah 12
1. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah 12
2. Fungsi-fungsi Manajemen 16
3. Keberlangsungan Bisnis 28
4. Keberlangsungan Bisnis dalam Perspektif Bisnis Syariah 30
5. Bisnis-bisnis yang Sesuai dengan Hukum Islam 35
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 37
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 37
2. Ciri-ciri Utama Badan Usaha Milik Desa 40
3. Tujuan dan Prinsip Badan Usaha Milik Desa 41
4. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa 43
5. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 44
6. Modal Usaha dan Bagi Hasil Usaha BUMDes 45
7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes 48
8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes 48
C. Kesejahteraan Masyarakat 49
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 50
2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Al-Qur'an 51
D. Kajian Terdahulu 51
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 62
C. Jenis dan Sumber Data 62
1. Data Primer 62

2. Data Sekunder 63
D. Informan Penelitian 63
E. Teknik Pengumpulan Data 63
1. Observasi 63
2. Wawancara 64
3. Dokumentasi 64
F. Metode Analisis Data 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum BUMDes Sakato 67
1. Profil BUMDes Sakato 67
2. Visi dan Misi BUMDes Sakato 70
3. Tujuan BUMDes Sakato 71
4. Struktur BUMDes Sakato 72
B. Hasil Penelitian 73
C. Hasil Analisis dan Pembahasan 77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 80
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 51
Tabel 3.1 Tahapan-tahapan Analisis Data 64
Tabel 4.1 Struktur BUMDes Sakato 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen Bisnis Syariah adalah serangkaian pengelolaan dalam aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang ataupun jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah.[1]

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup : pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong

[1] Suparjo Adi Suwarmo Supriyanto dan Ahmad Hendra Rofullah, *Manajemen Bisnis Syariah (Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah)*, (Indramayu: CV. Adanu Abitama cet. 1, 2021) hal. 7

gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.[2]

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga

[2] Maria Rosa, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Gunung Kidul, Yogyakarta*, Jurnal MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.[3]

Berdasarkan perhitungan yang cermat, kebutuhan dana BUMDes SAKATO untuk biaya investasi sebesar Rp. 30.000.000 dan modal kerja sebesar Rp. 20.000.000 sehingga total biaya yang diperlukan Rp. 50.000.000. Biaya investasi digunakan untuk pengadaan sarana komputer, meja, kursi, estalase, lemari dan sewa toko. Biaya modal kerja digunakan untuk insentif/ pengelola selama 12 bulan terhitung sejak kegiatan usaha dapat dioperasionalkan. Total modal awal tersebut diharapkan diperoleh dari Pemerintah Desa Punggung Lading.

Strategi pengelolaan BUMDes merupakan langkah yang dilakukan pengurus BUMDes untuk mencapai tujuan jangka panjang. Telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan namun setelah didirikannya BUMDes tersebut kegiatan operasionalnya tidak berjalan dikarena berbagai faktor. Oleh sebab itu perlu adanya strategi yang digunakan oleh setiap

[3] Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengolahan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 2.

BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan dan dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Ketika BUMDes menghadapi permasalahan yang mucul maka untuk menyesuaikannya diperlukan suatu strategi. Dalam memilih strategi dilihat dari berbagi strategi dengan lingkup permasalahan yang dihadapi agar dapat menggunakan startegi yang tepat dalam pengembangan BUMDes.[4]

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[5]

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menerapkan perseptif bisnis syariah.

---

[4]Lativfah Permata Zandri, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama*, Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam Vol. 6 No. 1, hal. 2.

[5] Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengolahan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 3.

Bisnis Syariah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).[6]

BUMDes Sakato merupakan Badan Usaha Milik Desa yang terletak di desa Punggung Lading Kota Pariaman Selatan, yang berdiri pada tanggal 11 November 2018 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan warga masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya.

BUMDes Sakato sudah merumuskan rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Rencana-rencana tersebut ialah melanjutkan usaha yang telah dijalankan oleh pengurus BUMDes yang lama seperti BRI-Link dan menjalankan usaha baru yaitu usaha laundry, setrika uap dan mengembangkan batik sampan. Perencanaan yang dibuat oleh pengurus BUMDes sangat berkesesuaian dengan tujuan BUMDes. Namun yang menjadi kendala BUMDes dalam menjalankan rencananya ialah dana yang dimiliki BUMDes belum mencukupi sehingga rencana tersebut belum terjalankan sepenuhnya.

Saat ini, kegiatan BUMDes yang sudah terjalankan ialah usaha BRI-Link melanjutkan kepengurusan yang lama sedangkan usaha batik sampan BUMDes

[6] Norvadewi, 2015, "Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01. Hal. 36.

baru memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sedangkan dana usaha batik sampan masih berasal dari masyarakat pribadi. Dan untuk dua usaha lainnya masih belum terjalankan.

BUMDes Sakato ini telah memiliki struktur organisasi kepengurusan, yaitu terdiri atas Komisaris, Direktur, Sekretaris dan Bendahara beserta pengurus lainnya dapat saling bekerja sama. Melihat perencanaan kedepannya, struktur organisasi BUMDes masih belum dapat memenuhi kebutuhan BUMDes seperti bagian pemasaran, produksi dan bagian Humas yang belum ada.

Kepemimpinan BUMDes saat ini kinerjanya cukup bagus. Namun kepemimpinan pada BUMDes masih ada berbagai kekurangan dimana pemimpin masih belum tegas pada pengurus BUMDes sehingga kedisiplinan belum berjalan dengan baik.

Untuk evaluasi kinerja BUMDes, saat ini para pengurus BUMDes Sakato sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDes. Namun hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan pada BUMDes Sakato.

Sebelumnya, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Punggung Lading dengan adanya BUMDes yang lama berjalan biasa saja, rata-rata unit usaha yang ada di desa berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan BUMDes, unit usaha BUMDes yang lama hanya *BRI-Link* saja itupun pelaksanaan di

lapangan tidak efektif disebabkan tempat BUMDes itu sendiri sering dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga disana. Oleh karena itu, masyarakat kurang berminat untuk melakukan transaksi BUMDes yang lama.

Semenjak revitalisasi BUMDes bulan Februari 2021 Kepala dan pengurus yang baru serta perangkat desa saling bekerja sama untuk menghidupkan kembali BUMDes Sakato Desa Punggung Lading ini. Banyak unit-unit usaha yang di rangkul oleh BUMDes, salah satunya unit Batik Sampan. Peran dari unit batik sampan memang belum terlalu terlihat, tapi sudah banyak masyarakat yang dirangkul untuk mengikuti pelatihan pembuatan batik sampan ini, sehingga diharapkan hal ini dapat mengurangi pengangguran masyarakat di desa punggung lading. Hingga saat ini anggota dari Batik Sampan di Desa Punggung Lading sudah berjumlah kurang lebih 10 orang. Promosi yang dilakukan pada unit batik sampan ini masih kecil-kecilan hal ini disebabkan dana yang belum cair dari pemerintah sehingga yang menjadi permasalahan utama usaha batik sampan ini adalah kurangnya modal untuk memproduksi batik dalam skala besar. Namun setelah satu bulan berdiri batik sampan ini sudah terjual sebanyak 10 pcs.

Selain usaha Batik Sampan direncanakan akan didirikan unit usaha laundry dan penyewaan kipas angin uap. Dan hal ini dapat diwujudkan jika unit usaha batik sampan berjalan lancar. Dengan adanya unit-unit usaha yang di

rangkul oleh BUMDes maka menambah pendapatan ekonomi juga bagi masyarakat yang ada di Desa Punggung Lading.[7]

Dari segi yuridis, BUM Desa "SAKATO" telah memiliki legalitas, karena sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian, secara yuridis tidak ada kendala untuk beroperasi.[8] Dari segi keuangan, BUMDes Sakato belum menerima dari desa disebabkan dana BUMDes saat sekarang ini belum dicairkan dengan alasan aturan yang sekarang dana untuk BUMDes boleh di transfer pada pencairan dana desa tahap dua sesuai ajuan proposal BUMDes dan menyesuaikan dengan dana desa.[9]

Berdasarkan kondisi yang rill maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN PADA BUMDES SAKATO DITINJAU DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (Studi Kasus : BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading Kota Pariaman)"**

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya unit usaha yang dikembangkan BUMDes "SAKATO" yaitu kegiatan usaha tagihan online berupa pembayaran listrik dan lainnya.
2. Adanya usaha pengelolaan kebutuhan terhadap air bersih.

---

[7] Wawancara dengan Ibu Dewi, tanggal 21 Maret 2021 di Kantor Desa Punggung Lading.

[8] Ringkasan Eksekutif BUMDes Punggung Lading hal. 2 diakses pada 06/11/2020 pukul 01.31 WIB.

[9] Wawancara dengan Ibu Dewi, tanggal 22 Juni 2021 di Kantor Desa Punggung Lading.

3. BUM Desa “SAKATO” telah memiliki legalitas, karena sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Unit-unit usaha lebih berkembang setelah adanya revitalisasi BUMDes.
5. Keuangan BUMDes belum dicairkan oleh desa dikarenakan adanya aturan yang baru.

C. Batasan Masalah

Agar fokus dalam penelitian ini yang menitik beratkan dalam Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu; “ Bagaimanakah Implementasi Manajemen Pada Bumdes Sakato Dalam Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah? ”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Implementasi Manajemen Pada Bumdes Sakato Menurut Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan bahan-bahan kajian dibidang pengembangan ilmu manajemen, terutama manajemen bisnis syariah.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi islam terutama mengenai Analisis Implementasi Manajemen Pada Bumdes Sakato Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti agar berpikir secara kritis dapat membandingkan antara ilmu yang ada di teori dan di lapangan (observasi), serta memberikan pengalaman selama observasi dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan peneliti di bidang Analisis Implementasi Manajemen Pada Bumdes Sakato Dalam Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah.

F. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam pemahaman agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan judul ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005).

Implementasi: Menurut Mulyadi (2015:12), Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Manajemen: Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan penggorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan.

Pada: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pada yaitu kata depan yang dipakai untuk menunjukan posisi di atas atau di dalam hubungan dengan di pakai di depan kata benda, kata ganti orang dan keterangan waktu.

BUMDes Sakato: Tempat Badan Usaha Milik Desa Sakato di desa Punggung Lading.

Perspektif : Perspektif menurut Martono (2010) adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Manajemen Bisnis Syariah: Manajemen Bisnis Syariah merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman. Panduan Islam dalam mengatur aktivitas bisnis antara lain: *planning, organization, controlling* dan *actuating*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Bisnis Syariah

1. Pengertian Bisnis dan Manajemen Bisnis Islam

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat.[10] Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya itu disebut manajemen.

Jika didefinisikan manajemen adalah suatu rangkaian aktifitas (termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[11]

Manajemen Islami adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari Allah SWT.

[10] Sutarno, *Serba Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 1.
[11] Griffin, *Manajemen*, alih bahasa Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 20.

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak mengurangi atau tidak memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan dan bawahan tidak mungkin pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Seharusnya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahan atau karyawannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi karyawannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Manajemen Islami harus didasari dengan nilai-nilai dan etika Islam. Islam yang ditawarkan berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Boleh saja berbisnis dengan label Islam, namun bila nilai dan akhlak Islam dalam melakukan bisnis tersebut ditinggalkan, maka tidaklah lagi pantas dianggap sebagai Islam.

Dalam rangkaian definisi bisnis dan manajemen diatas, secara ringkas manajemen bisnis adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan jalannya bisnis atau perusahaan, manajemen membantu bisnis fokus pada menetapkan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif sehingga dapat diperoleh keuntungan, kata manajemen juga merujuk pada orang-orang yang bertugas menjalankan bisnis. Manajer perlu pemahaman yang menyeluruh tentang operasi bisnis, yang melibatkan Manajemen Islami adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka

diharapkan perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari Allah SWT. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak mengurangi atau tidak memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan danbawahan tidak mungkin pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Seharusnya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahan atau karyawannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi karyawannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Manajemen Islami harus didasari dengan nilai-nilai dan etika Islam. Islam yang ditawarkan berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Boleh saja berbisnis dengan label Islam, namun bila nilai dan akhlak Islam dalam melakukan bisnis tersebut ditinggalkan, maka tidaklah lagi pantas dianggap sebagai Islam. Dalam rangkaian definisi bisnis dan manajemen diatas, secara ringkas manajemen bisnis adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan jalannya bisnis atau perusahaan, manajemen membantu bisnis fokus pada menetapkan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif sehingga dapat diperoleh keuntungan, kata manajemen juga merujuk pada orang-orang yang bertugas menjalankan bisnis. Manajer perlu pemahaman yang menyeluruh tentang operasi bisnis, yang melibatkan semua kegiatan perusahaan. Mereka mengembangkan tujuan untuk sebuah perusahaan atau departemen dan

kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui orang, proses kerja, dan peralatan. [12]

Definisi diatas makin relevan jika disempurnakan dengan tujuan-tujuan bisnis yang terkait dengan upaya untuk memupuk eksistensi, keberlangsungan, pertumbuhan, citra baik di masyarakat dalam rangka ikut serta mendukung kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan ikut serta dalam memecahkan sebagian persoalan masyarakat. Secara spesifik rumuskan bisnis Islami dapat dinyatakan sebagai institusi atau orang yang mendirikan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Ciri utama dari bisnis Islam adalah manusia sebagai pelaku usaha berkedudukan sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Allah untuk mengelola sumber daya. Tugas pengembanan amanah ini termasuk tugas ibadah kepada Allah SWT dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bisnis.

Dalam kaidah umum bahwa semua kegiatan melaksanakan amanah mengelola sumber daya ini, pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya. Oleh karena itu, manusia diserahi amanah untuk mengelolanya sesuai dengan tuntutan Syariah Islam.

Definisi bisnis secara Islami dapat diartikan aktivitas bisnis yang bertujuan dan bermaksud kurang lebih sama seperti maksud tujuan bisnis pada umumnya. Namun semua itu harus berdasarkan landasan tauhid. Dengan kata lain, tujuan bisnis memiliki dimensi horizontal, sekaligus berdimensi vertical

[12] Sutarno, *Serba Serbi Manajemen Bisnis*, hal. 2.

yakni diorientaskan kepada keesaan Allah yang di dalamnya diniatkan hanya mendambakan memperoleh keridhaan Allah.

Dengan demikian tujuan berbisnis yang sesungguhnya adalah dipersembahkan dalam rangka beribadah kepada Allah dan termotivasi untuk memperoleh ridha, pahala, dan barokah dari Allah. Oleh karena itu pula, paradigma demikian tentu harus merupakan derivasi ibadah yang berdimensi vertical ke dalam ibadah yang berdimensi horizontal yang harus dijalankan dengan cara yang sesuai Syariat-Nya dan sunnnatullah.[13]

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Adapunfungsi-fungsi manajemen itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni Fungsi Manajerial yang terdiri dari planning, organizing, directing, controlling. Dan Fungsi Operasional yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja (SDM), pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, agar pembahasan masalah tidak terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan ini pada fungsi manajerial saja.

Dalam hal ini penulis menggunakan teorinya G.R Terry yang memaparkan bahwa fungsi manajemen itu meliputi perencanaan (planning),

[13] Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hal. 1.

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) atau biasa disingkat menjadi POAC, namun untuk membedakan dengan manajemen pada umumnya maka penulis meninjau dari segi Islaminya.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berasal dari kata rencana yang diberi imbuhan pe- dan -an. Rencana adalah produk dari perencanaan, sedangkan perencanaan adalah proses penentuan rencana. Perencanaan berasal dari bahasa latin yaitu Planus yang berarti flat.

Pengertian perencanaan menurut G.R Terry dan LW. Rue merupakan proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Dilihat dari segi jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga yaitu: 1) perencanaan strategis, 2) perencanaan taktis dan 3) perencanaan operasional.[14]

Perencanaan strategis (Renstra) merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan strategis. Fokus rencana ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat dari sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis.

Perencanaan taktis, ditujukan untuk mencapai tujuan taktis. Rencana taktis mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan rencana

[14] G.R Terry dan L.W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 43.

strategis dan mempunyai focus yang lebih sempit dan lebih konkret, yakni lebih memfokuskan pada manusia dan aksi (tindakan).

Perencanaan operasional, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek. Perencanaan ini mempunyai dua jenis rencana yaitu rencana tunggal (sekali pakai) yang lebih sesuai digunakan untuk mencapai tujuan yang spesifik yang kemudian dihapus setelah tujuan tersebut tercapai dan stand planning (dapat dipakai berkali-kali) yang lebih sesuai dipakai untuk mencapai tujuan yang muncul berulang-ulang.[15]

Dalam Islam perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus disusun dalam sebuah pekerjaan/organisasi guna mencapai hasil secara optimal. Sebagaimana firman Allah surah al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dalam aktivitas rekrutmen terdapat dua sumber utama yang dapat digunakan, yakni: sumber internal dan eksternal. Adapun sumber internal (internal sources) berkenaan dengan karyawan-karyawan yang telah dimiliki lembaga tersebut sehingga beberapa langkah bisa disederhanakan atau dihilangkan karena calon-calon yang memenuhi persyaratan sudah dikenal

[15] Badruddin, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 66-67.

dan diketahui kemampuannya. Sedangkan sumber eksternal (external sources) merupakan pencarian calon karyawan di luar lembaga[16], yang mana dalam metode eksternal ini rekrutmen dapat dilakukan dengan bervariasi, diantaranya bisa melalui iklan di media cetak/televisi/radio, melalui agen/konsultan, melalui kenalan, melalui organisasi profesi, melalui sekolah/PT/Akademi serta melalui mantan karyawan.

Namun terdapat satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam pengadaan SDI yaitu konsep adil. Adil dalam rekrutmen berarti memberi peluang yang sama bagi setiap orang dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelamar, baik rekrutmen dilakukan secara eksternal maupun internal, semuanya tergantung pada kebutuhan dan kesesuaian antar kualifikasi yang dimiliki calon tenaga kerja dan lowongan yang tersedia.[17]

Menurut M. Manulang sebagaimana dikutip oleh I Komang Ardana menyebutkan beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi adalah sebagai berikut:

1) Keahlian, merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualifikasi utama yang menjadi acuan dalam seleksi. Keahlian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: technical skill yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh karyawan, human skill yaitu keahlian yang dimiliki pemimpin menengah

[16] Henry Simanmora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: bagian penerbitan STIE YKPN, 2004), hal. 170.

[17] Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, hal. 80.

dan conceptual skill yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pucuk pimpinan.

2) Pengalaman, merupakan hal yang cukup penting dalam seleksi karena calon karyawan yang berpengalaman dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas.
3) Umur, mendapat perhatian khusus dalam proses seleksi karena mempengaruhi kondisi fisik dan mental karyawan, kemampuan dan tanggung jawab.
4) Jenis kelamin, mendapat pertimbangan khusus dalam proses seleksi terutama untuk sifat pekerjaan tertentu, waktu kerja dan peraturan pemerintah.
5) Pendidikan dan pelatihan, meliputi pendidikan bersifat formal (SD sampai Perguruan Tinggi) dan pendidikan non formal.[18]

Setelah proses seleksi berakhir dengan diterimanya karyawan maka proses selanjutnya yaitu pembagian kerja atau penetapan struktur peran yang terdapat pada pengorganisasian, karena dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan SDI guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang berada dalam manajemen puncak pemilik hak untuk

[18] I Komang Ardana dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 73.

mengatur kegiatan (aktivitas) manajemen yang berbeda dan berhak mengeluarkan kebijakan.[19]

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan dari berbagai macam aktivitas yang perlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.[20]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang bersifat dinamis dan merupakan proses untuk memperoleh organisasi yang menjadi alat atau wadah bagi manajer dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya guna mencapai tujuan. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka

[19] Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 91.

[20] Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen (dasar, pengertian dan masalah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 118.

kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan desain organisasi sedangkan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan struktur organisasi.[21] Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi.[22] Proses dapat disebut dengan langkah atau urutan kegiatan yang harus dilaksanakan. Menurut Malayu S.P Hasibuan proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1) Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah profit, motive atau service motive.
2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer juga harus mengetahui, merumuskan serta menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
3) Pengelompokan kegiatan, setelah kegiatan-kegiatan apa saja yang telah ditentukan maka hendaknya manajer mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut kedalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.

Dalam organisasi tidak lepas dari yang namanya konflik, baik itu antara pemimpin dan karyawan maupun antar karyawan. Oleh karena itu sebagai pimpinan harus mengantisipasi terjadinya konflik yaitu dengan

[21] Badruddin, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 112.
[22] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 73

adanya pengakuan bahwa semua karyawan adalah saudara sehingga terjalin silaturahmi yang kuat dan segera mengklarifikasikan informasi.[23]

Menurut Malayu S.P Hasibuan, Pengorganisasian yang baik memiliki tanda-tanda/ciri-ciri sebagai berikut: "Tujuan organisasi yang jelas, pembagian organisasi yang baik, tipe/struktur organisasi yang sesuai, adanya job description, rentang kendali, sumber perintah yang jelas, jenis wewenang yang jelas, tidak ada mismanajemen, hubungan yang baik serta organisasi harus luwes dan fleksibel".[24]

Merupakan hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik, harus diikat pula oleh nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Bagi seorang manajer yang Islami, nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islami. Bagaimanapun sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang sehat yang bersumber dari agama.

Adapun nilai-nilai tersebut berupa keikhlasan, kebersamaan dan pengorbanan. Bila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi sudah ditetapkan dan posisi atau jabatan organisasi sudah diisi, maka proses selanjutnya adalah seorang manajer harus mengarahka bawahan agar tujuan organisasi dapat direalisasikan dengan baik.

c. Pengarahan (*Actuating*)

---

[23] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 2003), hal. 183.

[24] Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 126.

Pengarahan merupakan istilah yang sering dikenal sebagai penggerakan atau pengawasan serta merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Pengarahan dapat ditetapkan setelah adanya rencana, organisasi dan karyawan. Jika fungsi ini telah ditetapkan maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai.

Menurut G.R Terry sebagaimana ditegaskan oleh Badruddin bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok mau bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengarahan merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan. Agar suatu pengarahan dapat berhasil, perlu kiranya seorang atasan mengetahui aspek-aspek pokok pengarahan, adapun aspek-aspek pokok pengarahan tersebut yaitu:

1) Kepemimpinan, merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas anggota kelompok yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam kepemimpinan terdapat tiga unsur terpenting, yaitu: pimpinan, bawahan (pengikut) dan pembagian kekuasaan atau power.[25]

2) Motivasi, menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendefinisikan bahwa motivasi merupakan keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan (moves) dan mengarah atau menyalurkan prilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau keseimbangan.[26]
3) Mengembangkan komunikasi, merupakan kegiatan-kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam memberikan pengarahan yang efektif dapat dilaksanakan oleh seorang untuk satu kelompok. Yakni manajer yang melaksanakan pengarahan karena manajer mengetahui keahlian dan kemampuan karyawan, mengerti kapasitas dan keinginan karyawan, mengetahui hasil serta mengamati etos kerja karyawan. Dengan demikian manajer akan mampu memilih teknik memberikan pengarahan yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan secara terbaik. Adapun cara manajer mengarahkan karyawan yaitu dengan menggunakan instruksi-instruksi yang menunjang pengetahuan tentang aspek untuk melakukan tugas tertentu.

[25] Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, tt), hal. 29.
[26] Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 119.

Dalam menunjukan efektif atau ketidakefektifan manajemen pengarahan yaitu dengan melihat apakah perintah tersebut dilaksanakan atau diabaikan ketika terdapat perintah yang dikeluarkan.[27]

d. Pengendalian (*Controlling*)

G.R Terry memberikan pengertian bahwa pengendalian merupakan proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah danmembenarkan yang hak. pengendalian (controlling) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal. Pertama, pengendalian yang bersumber dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, sebuah pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri (sistem). [28]Jenis-jenis pengendalian yaitu:

1) Pengendalian *pendahuluan*, merupakan pengendalian yang cukup agresif dan memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun perubahanperubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi rencana terhambat akan selalu diantisipasi.

[27] Badruddin, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 161.
[28] Didin Hafidhuddun dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, hal. 156.

2) Pengendalian *concurrent* merupakan pengendalian ketika suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Tipe pengendalian ini kurang popular dibandingkan dengan tipe pengendalian pendahuluan, tetapi tipe pengendalian ini dapat digunakan sebagai pelengkap dan digunakan bersama-sama dengan pengendalian pendahuluan karena dengan adanya penggunaan bersama tersebut akan meningkatkan keamanan program atau kegiatan yang sedang dilakukan.
3) Pengendalian umpan balik (*post-action control*) pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa.

Sistem pengendalian yang baik tidak dapat lepas dari pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan). Jika seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan berbagai kesalahan, bahkan hingga merugikan lembaga bisnis tersebut maka karyawan tersebut sebaiknya diberikan punishment, sedangkan untuk menghargai karyawan yang bekerja dengan baik maka karyawan tersebut patut di beri reward.

Terdapat satu hal yang harus dipahami oleh seorang manajer, yaitu sebuah pengendalian akan berjalan dengan baik jika masing-masing manajer berusaha memberikan contoh yang terbaik kepada bawahannya. Untuk

menghasilkan pengendalian yang baik maka hendaknya menciptakan pengendalian yang efektif terlebih dahulu yang mana didasari pada sistem informasi manajemen.

3. Keberlangsungan Bisnis

Keberlangsungan (*sustainbility*) didalam kamus lengkap bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terus menerus dan berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan. Mendefinisikan keberlangsungan usaha adalah suatu bentuk konsistensi dari suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik menvakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha diamana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.[29]

Keberlangsungan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa fungsi bisnis penting akan tersedia untuk pelanggan, pemasok, regulator, dan entitas lain yang harus memiliki akses ke fungsi-fungsi. Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan usaha merupakan kondisi suatu usaha yang didalamnya terangkum kegiatan-kegiatan disertai berbagai cara yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam

[29] Niken Handayani, *"Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha"*, (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, 2013).

perkembangan ketahanan serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam suatu usaha industri.

Hartman dan Desjardis menyebutkan bahwa sebuah keberlangsungan bisnis memiliki tiga pilar sebagai tujuan yang disebut *three pilar of sustainability* yaitu mencakup keberlangsungan etis, keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi. Ketiga pilar tersebut juga sesuai dengan tiga elemen utama dalam penerapan keberlangsungan bisnis yang insiasi oleh Brundtland Report tahun 1989 bahwasanya menyebutkan tiga elemen yaitu *people*, profit dan planet.[30]

Keberlangsungan etis sama makna dengan elemen people dipandang sebagai manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang mengarah pada operasional perusahaan. orientasi perusahaan tidak semata-mata pada karyawan, namun juga untuk menjaga keberlangsungan konsumen, calon konsumen hingga para pesaing. Keberlangsungan lingkungan focus pada proses produksi yang dilakukan perusahaan diharapkan turut menjaga lingkungan sekitar sehingga pada jangka panjang dapat terjaga keberlangsungannya. Sedang yang terakhir keberlangsungan ekonomi yang dipahami sebagai bentuk profit yang diperoleh perusahaan melalui dilaksanakannya kegiatan operasional yang bertumpu pada kegiatan operasional yang memegang dimensi keberlangsungan etis dan lingkungan sehingga secara berkesinambungan

[30] Hartman dan Desjardins, *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 406.

menghasilkan pertumbuhan bagi perusahaan lewat produk yang diterima oleh konsumen.

Kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis yaitu keberlangsungan pemodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam dafinisi keberlangsungan usaha yaitu memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan melindungi seumber daya.

4. Keberlangsungan Bisnis dalam Perspektif Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah.[31]

Dalam sebuah bisnis dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk, pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa kedua, mencari profit (keuntungan) dan ketiga mencoba memuaskan keinginan konsumen. Islam mengajarkan pelaksanaan bisnis tersebut tetap berpegang pada syariat Islam yaitu Al-Qur‟an dan As-Sunnah.

[31] Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hal. 40.

Dengan adanya firman Allah SWT yang mengajarkan pda kita akan aturan-aturan atau batasan dalam melangkah saat bebrbisnis dengan adanya batasan halal dan haram, hal tersebut menunjukkan satu dari sekian macam aturan Allah SWT mengatur manusia dengan syariatnya. Pemanfaatan kendali syariat bisnis tersebut, keberlangsungan usaha dalam ajaran Islam menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai oleh pelaku usaha.

Dari definisi yang telah dijelskan diatas, bahwa sebuah keberlangsungan usaha perusaahan mencakup segala aspek yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjaga keberlangsungannya. Dilakukan organisir, diarahkan dan diawasi agar dapat berjalan lancar dan mampu tumbuh berkembang serta bertahan secara jangka panjang menjadi salah satu hal pokok tercapainya suatu keberlangsungan usaha disamping tetap berada dalam ladasan nilai-nilai Islam.

Allah SWT telah menyerahkan bumi dan seisinya untuk dikelola sebagai investasi manusia, sehingga manusia sebagai *khalifah* di bumi sudah sepatutnya mampu menjaga dan mengelola bumi agar tetap terjaga keberlangsungannya. Makna ini selaras dengan tujuan yang akanm dicapai oleh pelaku usaha Islam yang dalam proses pengelolaan suatu usaha harus dapat menumbuhkembangkan hingga tercapai suatu keberlamngsungan usaha sesuai dengan syariat Islam.

Keberlangsungan usaha ini tidak sempurna bila berhenti pada orientasi manajemen suatu perusahaan yang mampu mencapai target hasil dan pertumbuhan. Sehingga perlu adanya upaya agar pertumbuhan target hasil yang

diraih dapat dijaga keberlangsungannya memalui setiap aktivitas-aktivitas manajemen yang mampu menjaga keberlangsungan pertumbuhan usaha dalam bingkai syariah islam.

Islam mengajarkan semua proses yang dijalankan dalam mencapai keberlangsungan usaha tersebut harus sesuai syar‟‟i (AL-Qur‟‟an dan As-Sunnah). Dengan menjujung nilai-nilai spritual didalam berbagai sisi hingga pencapaian keberlangsungan usaha dalam bisnis Islam memegang suatu dimensi yaitu *rahmatan lil alamin* (memberi rahmat bagi seluruh alam), memberikan sesuatu untuk kemajuan peradaban dunia, serta bermuara pada pencari ridha Allah SWT. nilai- nilai dalam prinsip syariah menjadi semacam sprit (ruh) dalm setiap tindakan dan transaksi bisnis yang terjadi sepanjang proses pencapaian keberlangsungan usaha tersebut. Faktor berkah dan mencari ridha Allah SWT menjadi hal yang penting dalam pencapaian keberlangsungan usaha dalam bisnis yang berlandaskan prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip tersebut dapat diinginkan landasan orientasi bisnis agar senantiasa berada didalam koridor syariat Islam.

Kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, dan keberlangsungan pemasaran yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu memneuhi kebutuhan. Mengembangkan sumber daya dan melindungi sumber daya. Terdapat beberapa

aspek yang diperhatikan untuk perkembangan aktivitas usaha dalam kerangka Islam demi tercapainya keberlangsunga usaha yaitu:

a. Pemasaran

Memahami kondisi dan segala karkateristik pasar adalah langkah awal yang cukup penting, karena yang dilakukan dalm kegiatan ini akan merekomendasikan apa yang harus dibuat dan dilakukan sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan pasarnya yang dituju dan dijadikan target. Jika langhak ini yang dilakukan maka apa dan bagaimana yang dibuat sesuai dengan harapan dan keinginan pasar. Dengan demikian diharapkan reaksi pasar akan diprediksi memiliki loyalitas dan apresiasi pada perusahaan.

Jadi suksesnya perushaan ditentukan oleh loyalitas dan apresiasi pasar atau konsumen yang dijadikan target oleh perusahaan ini. Jika konsumen loyal terhadap perusahaan, maka kondisi ini akan menjamin perusahaan teruskan hidup dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang karena memperoleh dukungan dari konsumen.[32]

b. Permodalan atau Keuangan

Masalah pengelolaan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu bisnis. Keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana dan pengelolaan sumber dana. Pengelolaan penggunaan dan tercermin dalam bentuk berbagai aktiva dalam neraca, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Semakin tepat pengalokasian dana ke berbagai aktiva, maka semakin besar

[32] Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, hal. 149.

kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, semakin efisien penggunaan dana, tentunya semakin baik bagi perusahaan. pengelolaan sumber-sumber dana tercermin dalam bentuk berbagai jenis modal asing (hutang jangka pendek dan jangka panjang) dan moal sendiri. Semakin tepat penentuan sumber dana, semakin efisien pengelolaan dana dan berarti semakin baik bagi suatu bisnis.[33]

c. Sumber Daya Manusia

Didalam sebuah usaha penting adanya memperhatikan maslah sumber daya manusia karena hal ini sangat berpengaruh besar pada keberhasilan usaha khususnya pada keberlangsungan usaha. Dengan didukung sengan sumber daya manusia yang tepat maka akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Menurut Zahro, menyebutkan setidaknya ada empat syarat penting harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam sebuah usaha berbasis syariah yaitu:[34]

1) Memiliki Pengetahuan Tentang Syariah

Hal ini sangat penting mengingat usaha kita jalankan merupakan usaha yang berbasis prinsip-prinsip syariah ini harus diimplementasikan pada sikap dan berperilaku dalam bekerja. Perilaku ini akan tercermin

[33] Murti Sumarni dan John Suprianto, *Pengantar Bisnis (Dasar-dasarEkonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 315.

[34] Naimah Zahro, *"Pengembangan Ekonomi Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing di pasar global*", (Penelitian Strategis Nasional-LPPM UNAI Surabaya, 2009)

pada bagaimana ia memahami adab dalam melayani pelanggan dan bersikap dengan sesama.

2) Cakap (ahli) dalam bidang pekerjaannya

Dimanapun, tidak hanya pada usaha yang anda geluti, suatu pekerjaan pastilah membutuhkan kecakapan untuk mengerjakannya. Misalnya, kalau hendak mencari karyawan untuk bagian keuangan kecakapan ini bisa dilihat misalnya dari latar belakang pendidikannya adalah akuntansi, atau dia telah berpengalaman bejerja pada bagian tersebut dengan riwayat yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Hadist nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari "*Apabila urusan manajemen diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,*" (HR Bukhari).

3) Jujur dapat dipercaya

Menurut Afzalurrahman, "Kejujuran merupakan kualitas manusia yang membuat dirinya sadar sepenuhnya akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kesadaran atau (realisais aktif) terhadap tugas-tugas seseorang ini merupakan faktor yang penting dalam peningkatan efisiensi seorang pekerja.[35]

4) Kesungguhan dalam Bekerja

[35] Afzalurrahman, *Muhammad sebagai pedagang (Muhammad as a trade)*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hal. 241.

Manusia diciptakan untuk mencapai puncak kesenangan namun itu harus dicapai dengan keuletan dan kerja keras. Menurut Afalurrahman, kehidupan yang mudah dan menyenangkan dijanjikan kepada manusia yang bekerja dan tidak membuang-buang waktu untuk bermalas-malasan. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi umatnya bekerja keras dan semata untuk beribadah kepadaNya.

Melalui beberapa dimensi diatas yang dijalankan dalam tercapainya suatu keberlangsungan usaha dengan menitikberatkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu memnuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan melindungi sumber daya dan keseluruhannya senantiasa dalam bingkai syariah Islam. Dalam Islam keberlangsungan juga bermakna memberikan *muslahah* bagi orang lain dnegan menjunjung dimensi *rahmtan lil alamin* yaitu rahmat bagi semesta alam.

Pelaku bisnis juga dituntut selain mampu mamajukan usahanya sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan serta lingkungan sekitarnya atau sering disebut sebagai pihak-pihak terkait. Semua aspek diatas melekat sejaoan dengan aktivitas bisnis yang memegang nilai spritual Islam hungga pencapaian-pencapaian tersebut diharapkan dapat tercapai selaras dengan tujuan utamanya yaitu tercipta keberlangsungan usaha.

5. Bisnis-bisnis yang sesuai dengan Hukum Islam

Mengenai bisnis yang sesuai dengan hukum Islama dalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual barang jadi. Pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi : (1) Perdagangan, (2) Pengangkutan, (3) Penyimpanan, (4) Pembelanjaan, (5) Pemberian informasi.[36]

Bisnis Islami pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan.Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, professional dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi.[37]

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang

[36] Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 33.

[37] Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), hal. 61-62.

berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Community* 2015.[38]

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUMDes.[39] Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

---

[38]M. Alkhadafi, *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Community 2015*, Jurnal El-Riyasah Vol. 5 No. 1, hal. 32.

[39] Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

Badan Usaha Milik Desa Sakato atau yang sering di singkat BUMDes Sakato merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik pemerintah Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. BUMDes Sakato didirikan pada tanggal 11 November 2018 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan warga masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.[40]Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masayarakat yang ada di Desa Punggung Lading.[41]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.[42]

2. Ciri-ciri Utama Badan Usaha Milik Desa

---

[40] *Ringkasan Eksekutif BUMDes Punggung Lading hal. 1* diakses pada 06/11/2020 pukul 01.31 WIB.

[41] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 Pasal 2 hal. 3 diakses pada 31/12/2020 pukul 14.07 WIB

[42] Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 05. No. 01. hal. 02.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

3. Tujuan dan Prinsip Badan Usaha Milik Desa

Secara umum, empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:[43]

a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Meningkatkan pendapatan asli desa
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Empat tujuan utama pembentukan BUMDes Punggung Lading pada Pasal 3 Tujuan sebagiamana tertulis yaitu:

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat.
b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentaskan kemiskinan
c. Menciptakan lapangan pekerjaan, penyediaan dan jaminan sosial
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.[44]

---

[43] Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media,2016), hal.18.

[44] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 Pasal 3 hal. 4 diakses pada 31/12/2020 pukul 14.07 WIB

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:[45]

a. Koorperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
c. Emansipasif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku dan agama.
d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertangungjawabkan.
f. Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Pendirian BUMDes pada Pasal 4 Pendirian BUMDes sebagaimana tertulis mempertimbangkan:

[45]Z. Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, hal. 424-428.

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

b. Potensi usaha ekonomi Desa.

c. Sumber daya alam di Desa.

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.

e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.[46]

4. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

[46] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 Pasal 4 hal. 4 diakses pada 31/12/2020 pukul 14.07 WIB.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.[47]

5. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pada Pasal 11 Bagian Kesatu Pengelola sebagaimana tertulis yaitu:

a. Pengelola BUMDes ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa

b. Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) Komisaris.

[47] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 hal. 1 diakses pada 31/12/2020 pukul 16. 37 WIB

2) Pelaksana Operasional.

3) Badan Pengawas.

c. Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

d. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

e. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.

f. Organisasi kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.[48]

6. Modal Usaha dan Bagi Hasil Usaha BUMDES.

Pada Pasal 30 Permodalan sebagaimana tertulis Modal BUMDes berasal dari:

a. Pemerintah Desa Punggung Lading dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 2019 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Desa sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).**

b. Tabungan Masayarakat.

c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

d. Pinjaman.

e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah.

[48] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 hal. 6 Pasal 11 diakses pada 31/12/2020 pukul 16.19 WIB

f. Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga.

Pada Pasal 31 sebagaimana tertulis:

a. Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
b. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
c. Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
d. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 32 sebagaimana tertulis:

a. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
b. Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pada pasal 33 sebagaimana tertulis yaitu Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berasal dari dana bergulir program

pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kota yang diserahkan kepala desa dan masyarakat melalui pemerintah desa.

Pada Pasal 34 Bagi Hasil Usaha sebagaimana tertulis yaitu:

a. Dalam waktu 1 (Satu) tahun buku operasional BUMDes dapat dibagi hasil usaha BUMDes
b. Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha
c. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, komisaris, badan pengawas, pelaksanaan operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya
d. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:[49]

    1) Penambahan Modal Usaha 20%
    2) Pendapatan asli desa 20%
    3) Komisaris dan Badan Pengawas 10%
    4) Pelaksana Operasional 40%
    5) Pendidikan dan Sosial 10%

    _____ 100%

[49] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 Pasal 30-34 hal. 11-12 diakses pada 31/12/2020 pukul 15.54 WIB

7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

   Pada Pasal 37 Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana tertulis yaitu:

   a. Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa
   b. Laporan pertanggung jawaban sebagai
   c. Dimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   d. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
   e. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
   f. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
   g. Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban disesuaikan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

   Adapun jenis usaha BUMDes Sakato diterapkan dalam Peraturan Desa Punggung Lading pada Pasal 8 Jenis Usaha tertulis yaitu:

   a. Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain:
      1) Pelayanan Jasa yang meliputi: Pembayaran Tagihan secara Online
      2) Perdangangan sarana produksi, produksi pertanian meliputi: Produksi Pangan, Perternakan dan Perikanan
   b. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

   BUMDes dilarang menjalankan usaha pada Pasal 9 tertulis yaitu:

1) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat Desa Punggung Lading
3) Merugikan kepentingan masyarakat Desa Punggung Lading[50]

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.[51] Kesejahteraan merupakan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahir dan bathin[52]. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukanpemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

---

[50] Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018 Pasal 8-9 hal. 5 diakses pada 31/12/2020 pukul 14. 38 WIB

[51] Arifin Taslim, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB, 2014), hal. 144.

[52] Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu kondisi yang meperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.[53]

2. Kesejahteraan Menururt Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan tujuan dari agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejehteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya.[54]

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun demikian penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

a. QS. Al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

[53] Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hal. 145.

[54] Agung Eka Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/ No. 1/Jan-Juni 2014.

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"

D. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengamati hasil-hasil penelitian dahulu yang relevan. Kajian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No.	**Peneliti Tahun**	**Sumber Penelitian**	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
1.	Irkham Abdur Rochim (2019)	*Skripsi*	*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus*	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa BUMDes Desa Blimbing dapat membantu perekonomian masyarakat melalui jasa pelayanan, peminjaman modal, penyediaan sembako dan wisata air tubing meskipun belum maksimal.

			Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)	
2.	Satika Rani (2018)	*Skripsi*	*Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro*	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman modal, penyediaan sembako, jasa pelayanan maupun penyewaan mesin mollen yang sedikit banyak BUMDes ini telah berperan bagi masyarakat meskipun belum maksimal. Dengan demikian masyarakat Desa Karya Mulia Sari tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya

			Kabupaten Lampung Selatan)	menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Karya Abadi ini tetap mengikuti syariat-syariat islam.
3.	Hartini (2019)	*Skripsi*	*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangnga Kabupaten Polman*	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara pengelola dan warga masyarakat Desa Batetangnga bahwasannya BUMDes Batetangnga memang sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam, namun yang harus di perhatikan adalah pemberian konfensasi yang kadang masih belum sesuai harapan para pengelola dan pengurus BUMDes

				Batetangnga dan juga yang perlu di perhatikan adalah masalah professionalismenya karena menganggap mereka semua adalah keluarga maka pelayanannya pun di samakan dengan pelayanan yang tidak terlalu formal sebagaimana mereka melayani keluarga sendiri
4.	Maria Rosa Ratna Sri Aggraeni (2016)	*Journal Modus, Vol. 28, No. 2, 2016*	*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Peranan Kesejahteraan Masyarakat Pada Pedesaan (Studi Kasus BUMDes Gunung Kidul,*	Hasil penelitian tampak bahwa alokasi keuntungan dari ketiga BUMDes yang diperuntukkan bagi pedukuhan mendapat prosentase yang paling kecil. Hal ini berdampak pada kecilnya alokasi keuntungan yang diterima oleh dusun, yang notabene

			Yogyakarta).	berelasi langsung dengan warga. Pendapat warga yang mengatakan bahwa BUMDes tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dapat disebabkan oleh kecilnya prosentase yang diterima dusun-dusun. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BUMDes untuk digunakan warga, sebagian besar dapat dikatakan salah sasaran. Pengguna fasilitas didominasi warga dari luar desa, ataupun warga yang memiliki relasi dengan pengelola. Sedangkan masyarakat desa atau bahkan yang berada di

				sekitar BUMDes tidak merasakan secara langsung manfaat ekonomis dari keberadaan BUMDes.
5.	Kateria Fitriska (2019)	*Journal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 2, 2017*	*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara*	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jaya Gemilang. Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurang nya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan

				BUMDes Jaya Gemilang Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Adapun Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jaya GemilangDalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara bisa dilihat sebagai berikut :Utara bisa dilihat sebagai berikut : 1)Pengamatan Lingkungan, dari hasil pengamatan lingkungan terkait dengan usaha yang dijalankan. Lingkungan yang ada didesa Lancang Kuning sudah dapat dikatakan lingkungan

				yang cocok untuk didirikannya BUMDes namun kurang pemanfaatan dari pengelola. 2)Perumusan strategi, dalam hal ini perlunya BUMDes Jaya Gemilang melakukan perencanaan dalam membuat misi, tujuan dan strategi namun dalam kenyataanya belum semua misi, tujuan dan strategi tersebut terlaksana sesuai apa yang diharapkan. 3)Implementasi Strategi, pada implementasinya strategi sudah terlaksana namun kenyataanya strategi yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimanamestinya

				terlihat dengan adanya salah satu unit usaha yangberhenti beroperasi yaitu unit usaha pencucian motor. 4)Evaluasi dan pengendalian, pada tahap ini BUMDes harus melakukan penyerahan laporan setiap unit usaha yang dijalankan agar setiap kegiatan yang berlansung dapat selalu diawasi dan ditinjau serta perlunya evaluasi/perbaikan-perbaikan dalam menjalankan BUMDes Jaya Gemilang terlihat dengan sosialisasi yang dilakukan hanya kepada tokoh-tokoh masyarakat.
6.	Ni Luh	*Journal*	*Peranan Badan*	Hasil dari penelitian yaitu

	Putu Sri Pradnyani (2019).	*Riset Akuntansi, Vol 9, No. 2, September 2019.*	*Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara.*	pendapatan Asli Desa sebelum adanya BUMDes didapatkan dari sumbangan masyarakat dan setelah adanya BUMDes, Pendapatan Asli desa Tibubeneng didapatkan dari pembagian prosentase keuntungan BUMDes. Berdasar-kan AD/ART BUMDes, pembagian keuntungan desa sebesar 30 persen dari laba yang diperoleh oleh BUMDes. Pendapatan desa dari BUMDes belum maksimal karena pendapatan dari BUMDes dari unit usaha belum memperoleh keuntungan secara maksimal. Sedangkan dari

				sisi kesehatan dan pembangunan di desa Tibuneneng, BUMDes tidak memberikan peran maksimal karena sudah dibiayai dari Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. [55]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[56]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Sakato Kota Pariaman, Sumatera Barat dimulai pada bulan Agustus 2021 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari lapangan yang diperoleh

[55] Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 46.

[56]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV.Jejak, 2018) hal.7

melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner[57]. Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung yang ditanyakan kepada pengurus BUMDes Sakato yang berada di Desa Punggung Lading selama berdirinya BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah diterbitkan serta bersifat siap pakai. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan-laporan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi atau fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Punggung Lading beserta jajarannya dan pengurus BUMDes Sakato yang berada di Desa Punggung Lading Kota Pariaman.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting merupakan proses pengamatan dan ingatan.[58] Kegunaan melakukan observasi ini yaitu untuk memperoleh suatu gambaran saat melakukan

[57]Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 36.
[58] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penada Media Grup, 2011), hal. 203.

penelitian dilapangan dan mendapatkan keterangan rill mengenai Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan diwawancarai yaitu pengurus BUMDes Sakato yang berada di Desa Punggung Lading Kota Pariaman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cindera mata, laporan, artefat dan dapat juga berbentuk file di server. Data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu[59]. Data ini bisa berbagai keterangan yang berbentuk tulisan ataupun foto yang berhubungan dengan penelitian dan melengkapi sumber data tersebut.

F. Metode Analisis Data

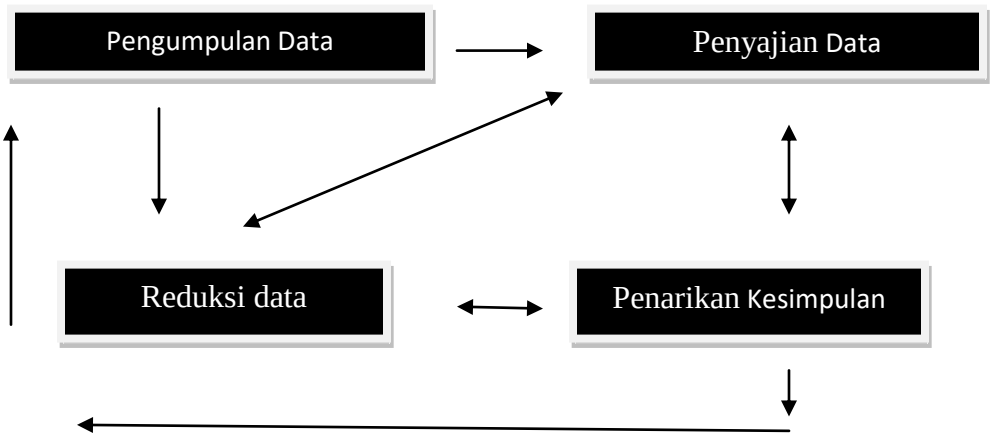
Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan

[59] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 205.

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[60] Dikarenakan penulis bermaksud memperoleh hasil saat penelitian dilapangan yang mendalam tentang Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah.

Tabel 3.1

Tahapan-tahapan Analisis Data



Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh analisis data:[61]

1. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal. 15.

[61] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hal 188.

melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data penulis harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan seluruh hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan mengenai kegiatan BUMDes Sakato selama beroperasi. Informasi yang didapatkan oleh peneliti merupakan hasil wawancara dengan informan peneltian, hasil observasi yakni dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan hasil dokumentasi arsip-arsip dan dokumen penelitian yang berkaitan dengan kegiatan BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini akan di bahas sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

A. Gambaran Umum BUMDes Sakato

1. Profil BUMDes Sakato

Badan Usaha Milik Desa **"**Sakato" atau sering disingkat BUMDes Sakato merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. BUMDes Sakato didirikan pada tanggal 11 November 2018 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan warga masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

BUMDes Sakato telah memiliki strukstur organisasi kepengurusan yang lengkap dan cukup sederhana (ramping), yaitu terdiri atas Komisaris, Direktur, Sekretaris dan Bendahara. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa, Direktur dijabat oleh Desrizal Sekretaris dijabat oleh Indah Irmayuni dan Bendahara dijabat oleh

Tira Eka Putri. Komisaris beserta seluruh pengurus lainnya dapat saling bekerjasama sehingga kegiatan usaha BUMDes yang sudah ada dapat berjalan dengan baik. Salah satu unit usaha yang akan dikembangkan BUMDes "SAKATO" adalah kegiatan usaha tagihan online. Munculnya ide untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dilatar belakangi oleh karena tingginya kebutuhan masyarakat desa Punggung Lading akan pembayaran atau Jasa Pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari. Baik itu pembayaran tagihan listrik maupun, air taguhan online lainnya.

Kegiatan usaha Jasa Pembayaran ini memiliki prospek yang sangat bagus, baik ditinjau dari segi sosial maupun dari segi bisnis. Dari segi sosial, dengan adanya kegiatan usaha tersebut akan sangat membantu warga desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih, sehingga akan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Dari segi bisnis, kegiatan usaha pengelolaan air bersih sangat diminati oleh warga desa, sehingga untuk pemasaran produk sangat mudah karena pasarnya selalu tersedia. Terlebih di Desa Punggung Lading tidak ada pihak-pihak yang membuka usaha sejenis, sehingga tidak ada pesaingnya.

a. Kondisi Geografis

Desa Punggung Lading adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pariaman Selatan.Jarak tempuh wilayah Desa Punggung Lading dari Ibukota Kota Pariaman 5 km. Desaini memiliki luas wilayah 2.056,37 Ha. Adapun batas-batas di desa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rambai Kec. Pariaman Selatan

Sebelah Timur : Rambai Kec. Pariaman Selatan dan Limau Hantu Kab. Padang Pariaman

Sebelah Selatan : Ampalu Tinggi dan Toboh Mandahiling Kab. Padang Pariaman.

Sebelah Barat : Kaluat dan Air Santok Kec. Pariaman Timur.

Desa Punggung Lading memiliki Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.Tanaman jangka panjang adalah kopi, cengkeh serta kakao, sedangkan tanaman jangka pendek adalah sayur-sayuran.

Desa Punggung Lading memiliki jumlah penduduk 486 KK yang terdiri atas 929 jiwa laki-laki dan 922 jiwa perempuan. Sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1.851 jiwa.Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Punggung Lading meliputi: Petani, Pengusaha/Pedagang, PNS, Tukang Kayu, Tukang Batu, Perbengkelan, Tukang Ojek, Kerajinan Tangan, Buruh Tani, Buruh Bangunan, dan beberapa warga merantau keluar daerah untuk mencari nafkah.

b. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Punggung Lading terletak di Dusun Parit dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki. Secara administratif Desa Punggung Lading terbagi atas 3 dusun yaitu:

1) Dusun Punggung Lading
2) Dusun Parit
3) Dusun Sampan

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepadamasyarakat desa, dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Walikota melalui Camat, kemudian dari pada itu Kepala Desa bersama dengan BPD setiap tahun wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya.

2. Visi Dan Misi BUMDes Sakato

a. Visi BUMDes Sakato

"Terwujudnya Kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa Kepada Allah SWT"

b. Misi BUMDes Sakato

1) Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2) Menampung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ditekuni masyarakat.
3) Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
4) Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatan kesejahteraan.

5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Tujuan BUMDes Sakato

a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.

b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha anggota masyarakatdesa yang berpenghasilan rendah).

c. Meningkatkan pendapatan asli desa.

1) Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Menampung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ditekuni masyarakat.

3) Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.

4) Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatan kesejahteraan.

5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangan.

d. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Struktur BUMDes Sakato

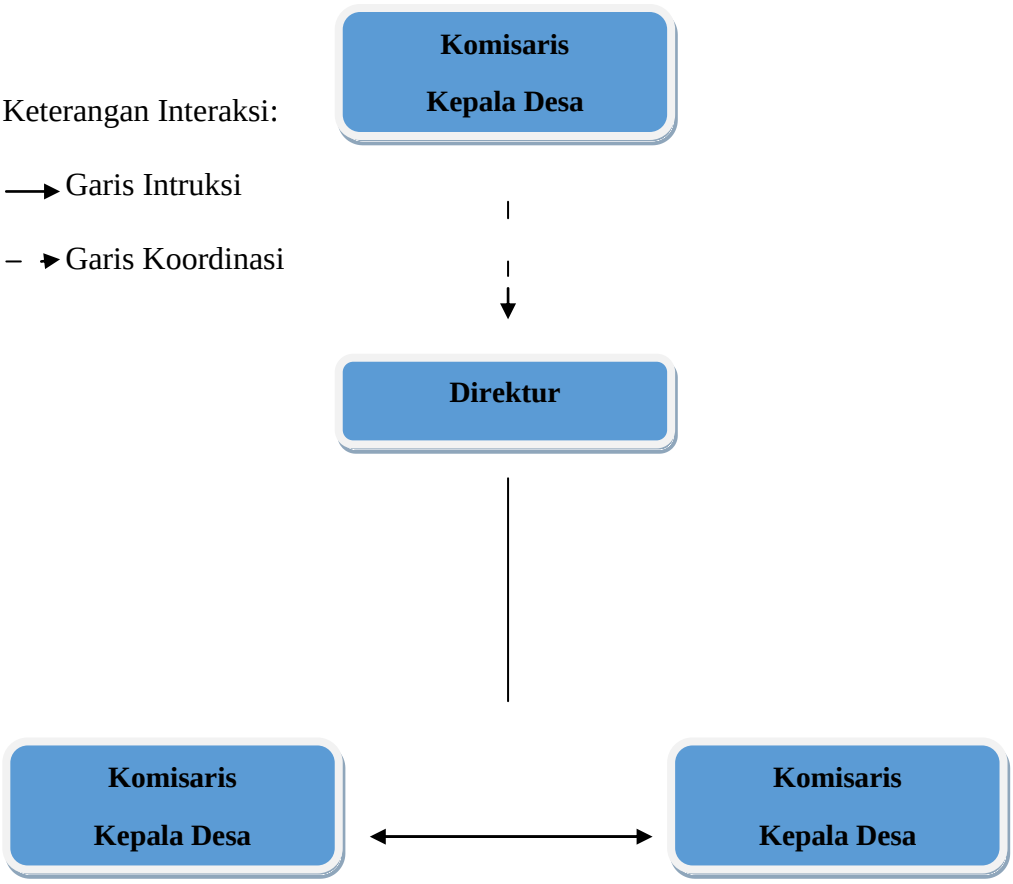
Tabel 4.1

Struktur BUMDes Sakato

Keterangan Interaksi:

Garis Intruksi

Garis Koordinasi



B. Hasil Penelitian

Dari Hasil Penelitian, penulis menjabarkan tentang fungsi-fungsi Manajemen pada BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

   Perencanaan merupakan upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik ialah perencanaan sesuai tujuan perusahaan, tepat sasaran, elemen perusahaan menjalankan fungsinya sesuai perencanaan program adanya peningkatan kualitas kinerja karyawan, perencanaan berhasil membuat sebuah pelaksanaan. BUMDes Sakato sudah merumuskan rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk kedepannya.

   Rencana-rencana tersebut ialah melanjutkan usaha yang telah dijalankan oleh pengurus BUMDes yang lama seperti BRI-Link. BRI-Link bergerak di bidang jasa keuangan dimana layanan yang disediakan adalah transfer, pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan air bersih dan tagihan online lainnya. Sampai saat ini BRI-Link masih berjalan sangat lancar lalu menjalankan usaha baru yaitu usaha laundry, setrika uap dan mengembangkan batik sampan. Perencanaan yang dibuat oleh pengurus BUMDes sangat berkesesuaian dengan tujuan BUMDes. Namun untuk saat ini kinerja pengurus dalam melaksanakan perencanaan masih belum maksimal dan masih terjadi berbagai masalah pada masing-masing pengurus.

Yang menjadi kendala lain BUMDes dalam menjalankan rencananya ialah dana yang dimiliki BUMDes belum mencukupi sehingga rencana tersebut belum terjalankan sepenuhnya.

Saat ini, kegiatan BUMDes yang sudah terjalankan ialah usaha BRI-Link melanjutkan kepengurusan yang lama sedangkan usaha batik sampan BUMDes baru memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sedangkan dana usaha batik sampan masih berasal dari masyarakat pribadi. Dan untuk dua usaha lainnya masih belum terjalankan.

2. Penggorganisasian (*Organizing)*

Menurut Schermerhorn pengorganisasian merupakan proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama. Pengorganisasian yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut ini yaitu memiliki anggota yang kuantitas serta identitasnya jelas, memiliki identitas yang jelas mengenai keberadaannya, memilki struktur organisasi yang jelas pembagian kerja yang jelas, mengacu pada manajemen yang sehat dan memilki manfaat bagi lingkungan.

BUMDes Sakato ini telah memiliki struktur organisasi kepengurusan, yaitu terdiri atas Komisaris, Direktur, Sekretaris dan Bendahara beserta pengurus lainnya dapat saling bekerja sama. Para pengurus BUMDes sudah memiliki standar kualitas yang dibutuhkan pada posisi yang ditempati seperti pendidikan, pengalaman dan kinerja.

Namun untuk pembagian divisi kerja pada BUMDes masih terasa sangat sederhana, dimana ada bagian yang harusnya dibentuk namun belum ada pada struktur organisasi BUMDes bagian pemasaran, produksi dan bagian Humas yang belum ada.[62]

3. Kepemimpinan (*Actuating*)

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah direncanakan. Tujuan kepemimpinan yaitu untuk mencapai sasaran perusahaan. Kepemimpinan yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut ini yaitu memiliki manajemen yang baik untuk diri sendiri terlebih dahulu, memiliki strategi dalam bertindak, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki tujuan yang jelas serta konsisten untuk mencapai suatu tujuan dalam perusahaan.

Kepemimpinan BUMDes saat ini kinerjanya cukup bagus dikarenakan pemimpin BUMDes sering melaksanakan pertemuan untuk membahas-membahas kegiatan BUMDes setiap perencanaan yang akan dilaksanakan pada kegiatan BUMDes dan pemimpin BUMDes mengevaluasi perkembangan usaha yang telah ada sekaligus mengevaluasi perbaikan kinerja-kinerja pengurus BUMDes masing-masing. Namun pada pengaplikasiannya strategi-strategi pada BUMDes belum berjalan efektif.

[62] Wawancara dengan Ibu Dewi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021

Dan dalam penerapan peraturan pada pengurusnya masih ada berbagai kekurangan dimana pemimpin masih belum tegas pada pengurus BUMDes sehingga kedisiplinan belum berjalan dengan baik.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Evaluasi merupakan proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencananan dan berhasil mencapai tujuan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Evaluasi yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut ini yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, mengukur prestasi, mengambil tindakan korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi dan evaluasi terjadi di tiga tingkat hirarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi atau unit bisnis strategis dan fungsional.

Untuk evaluasi kinerja BUMDes, saat ini para pengurus BUMDes Sakato sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDes. Evaluasi kinerja yang berhasil di BUMDes yang tampak pada saat ini yaitu dimana masyarakat yang pada mulanya acuh tak acuh sekarang mampu di rangkul BUMDes untuk berkerja sama dalam menjalankan perencanaan BUMDes yaitu kegiatan memproduksi batik sampan. Namun hingga saat ini pada usaha batik sampan masih belum ada perkembangan yang signifikan pada BUMDes Sakato karena BUMDes baru

memberikan pelatihan-pelatihan saja kepada masyarakat belum ada pemasukan untuk BUMDes.[63]

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara para pengurus BUMDes Sakato didapatkan kesimpulan bahwa implementasi manajemen pada BUMDes Sakato belum diterapkan dengan baik. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), penggorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Menurut penulis perencanaan (*planning*) pada BUMDes Sakato berkesesuaian dengan tujuan BUMDes namun masih belum berjalan secara efektif dikarenakan dana dari BUMDes belum cair oleh pemerintah desa dimana dua unit usaha yang belum bisa dilaksanakan. Kemudian adanya terjadi permasalahan pada kinerja masing-masing pengurus di BUMDes Sakato.

Menurut penulis sebaiknya BUMDes Sakato mencari solusi seperti mengajak bermusyawarah kepada kepala desa dan masyarakat yang berada di Desa Punggung Lading untuk mencari dana dari para donator agar perencanaan bisa berjalan.

Pada penggorganisasian (*organizing*) di BUMDes Sakato masing-masing posisi sudah memiliki job spesifikasi yang dibutuhkan BUMDes. Namun struktur organisasi nya masih belum kompleks dikarenakan pembagian divisi kerja masih tergolong cukup sederhana yang mana pada strtuktur organisasi nya

[63] Wawancara dengan Bapak Rico dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021.

belum ada pembagian manajemen seperti pemasaran, produksi dan Hubungan Masyarakat berada di BUMDes Sakato.

Menurut penulis sebaiknya BUMDes melakukan koordinasi dengan Kepala Desa beserta pengurus desa untuk merumuskan penambahan divisi kerja dikarenakan BUMDes memiliki unit usaha baru yang bergerak di bidang produksi dan penjualan.

Pada Kepemimpinan (*Actuating*) di BUMDes Sakato kinerjanya cukup bagus dikarenakan pemimpin BUMDes sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengevaluasi kinerja yang berada di BUMDes. Namun kepemimpinan BUMDes masih ada berbagai kekurangan terutama dalam penerapan dan pelaksanaan strategi-strategi, terutama dalam pengurusan kepegawaian dimana banyak pengurus yang masih belum disiplin. Dan masih ada konflik internal sesama pegawai yang berada di BUMDes.

Menurut penulis sebaiknya secara teknis pemimpin BUMDes harus tegas kepada pengurus-pengurus BUMDes sering interaksi komunikasi, menyelasaikan konflik internal pengurus BUMDes agar supaya BUMDes berkembang dan bisa melaksanakan strategi-strategi yang lebih baik lagi.

Pada Pengevaluasian (*Controlling*) di BUMDes Sakato kinerjanya cukup bagus dikarenakan dahulu berdirinya BUMDes lama masyarakat yang berada di desa masih acuh tak acuh dengan keberadaan BUMDes ini. Semenjak revitalisasi, BUMDes yang baru bisa mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam kegiatan BUMDes seperti memproduksi batik sampan tetapi belum ada

perkembangan secara signifikan dalam proses pembuatan batik sampan dimana masyarakat sudah melakukan pelatihan-pelatihan pembuatan batik sampan.

Menurut penulis sebaiknya hal yang dilakukan BUMDes setelah dilakukan evaluasi ialah cepat melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh BUMDes sehingga perencanaan dan tujuan BUMDes dapat terlaksana dan tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen pada BUMDes Sakato ditinjau dari perspektif Manajemen Bisnis Syariah adalah:

1. Perencanaan (*planning*) pada BUMDes Sakato berkesesuaian dengan tujuan BUMDes namun masih belum berjalan secara efektif dikarenakan dana dari BUMDes belum cair oleh pemerintah desa dimana dua unit usaha yang belum bisa dilaksanakan. Kemudian adanya terjadi permasalahan pada kinerja masing-masing pengurus di BUMDes Sakato. Sebaiknya BUMDes Sakato mencari solusi seperti mengajak bermusyawarah kepada kepala desa dan masyarakat yang berada di Desa Punggung Lading untuk mencari dana dari para donator agar perencanaan bisa berjalan.
2. Penggorganisasian (*organizing*) di BUMDes Sakato masing-masing posisi sudah memiliki job spesifikasi yang dibutuhkan BUMDes. Namun struktur organisasi nya masih belum kompleks dikarenakan pembagian divisi kerja masih tergolong cukup sederhana yang mana pada strtuktur organisasi nya belum ada pembagian manajemen seperti pemasaran, produksi dan Hubungan Masyarakat berada di BUMDes Sakato. Sebaiknya BUMDes melakukan koordinasi dengan Kepala Desa beserta pengurus desa untuk merumuskan

penambahan divisi kerja dikarenakan BUMDes memiliki unit usaha baru yang bergerak di bidang produksi dan penjualan.

3. Kepemimpinan (*Actuating*) di BUMDes Sakato kinerjanya cukup bagus dikarenakan pemimpin BUMDes sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengevaluasi kinerja yang berada di BUMDes. Namun kepemimpinan BUMDes masih ada berbagai kekurangan terutama dalam penerapan dan pelaksanaan strategi-strategi, terutama dalam pengurusan kepegawaian dimana banyak pengurus yang masih belum disiplin. Dan masih ada konflik internal sesama pegawai yang berada di BUMDes. Sebaiknya secara teknis pemimpin BUMDes harus tegas kepada pengurus-pengurus BUMDes sering interaksi komunikasi, menyelasaikan konflik internal pengurus BUMDes agar supaya BUMDes berkembang dan bisa melaksanakan strategi-strategi yang lebih baik lagi.
4. Pengevaluasian (*Controlling*) di BUMDes Sakato kinerjanya cukup bagus dikarenakan dahulu berdirinya BUMDes lama masyarakat yang berada di desa masih acuh tak acuh dengan keberadaan BUMDes ini. Semenjak revitalisasi, BUMDes yang baru bisa mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam kegiatan BUMDes seperti memproduksi batik sampan tetapi belum ada perkembangan secara signifikan dalam proses pembuatan batik sampan dimana masyarakat sudah melakukan pelatihan-pelatihan pembuatan batik sampan. Sebaiknya hal yang dilakukan BUMDes setelah dilakukan evaluasi ialah cepat melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami

oleh BUMDes sehingga perencanaan dan tujuan BUMDes dapat terlaksana dan tercapai.

5. Berdasarkan manajemen bisnis syariah, manajemen yang ada pada BUMDes Sakato belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah karena manajemen pada BUMDes belum dikelola secara maksimal dimana dalam islam manajemen hal yang sangat penting dan diutamakan dalam memulai segala kegiatan sesuai dengan Q.S As-Saff ayat 4:

   إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

   Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

   Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa manajemen merupakan hal yang sangat penting sebelum memulai suatu kegiatan dan Allah menyukai segala sesuatu yang teratur dan terencana sedangkan pada BUMDes Sakato manajemen nya masih belum dikelola secara maksimal dan masih terjadi beberapa kesalahan-kesalahan.

B. Saran

Adapun saran penulis sebagaimana yang berada di BUMDes Sakato di Desa Punggung Lading yaitu:

1. Pada perencanaan sebaiknya BUMDes Sakato mencari solusi seperti mengajak bermusyawarah kepada kepala desa dan masyarakat yang berada di Desa

Punggung Lading untuk mencari dana dari para donator agar perencanaan bisa berjalan.

2. Pada penggorganisasian sebaiknya BUMDes melakukan koordinasi dengan Kepala Desa beserta pengurus desa untuk merumuskan penambahan divisi kerja dikarenakan BUMDes memiliki unit usaha baru yang bergerak di bidang produksi dan penjualan.
3. Pada pengarahan sebaiknya secara teknis pemimpin BUMDes harus tegas kepada pengurus-pengurus BUMDes sering interaksi komunikasi, menyelasaikan konflik internal pengurus BUMDes agar supaya BUMDes berkembang dan bisa melaksanakan strategi-strategi yang lebih baik lagi.
4. Pada pengevaluasian sebaiknya hal yang dilakukan BUMDes setelah dilakukan evaluasi ialah cepat melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh BUMDes sehingga perencanaan dan tujuan BUMDes dapat terlaksana dan tercapai.

Daftar Pustaka

Afzalurrahman. 1997. *Muhammad sebagai pedagang (Muhammad as a trade)*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.

Alkhadafi, M. 2015. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Community.* Jurnal El-Riyasah Vol. 5 No. 1.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV.Jejak.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV. Jejak.

Azwar, Saifuddin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Badruddin. *Dasar-dasar Manajemen*.

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Dewi, Amalia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Jurnal of Rural and Development Volume V No. 1.

Fattah,Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya,).

Griffin. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gemani Insani Press,).

Hafidhuddun, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*.

Handayani, Niken. 2013. *"Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha"*. Skripsi-Universitas Sebelas Maret.

Hartman dan Desjardins. 2011. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen (dasar, pengertian dan masalah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jusmaliani. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*.

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengolahan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Komang I Ardana dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Malahayati. 2010. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher.

Muslich. 2007. *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Narbuko, Cholid Abu Ahmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penada Media Grup.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Norvadewi. 2015. *"Bisnis dalam Perspektif Islam".* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01.

Purwana, Agung Eka. 2014. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/ No. 1.

Ridlwan, Z. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3.

Rosa, Maria. 2016. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Gunung Kidul*. Yogyakarta: Jurnal MODUS Vol.28 (2): 155-167.

Simanmora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Sinn Abu, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sodiq, Amirus. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumarni, Murti dan John Suprianto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasarEkonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty.

Sutarno. 2012. *Serba Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwarmo, Suparjo Adi Supriyanto dan Ahmad Hendra Rofullah. 2021.*Manajemen Bisnis Syariah (Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah*. Indramayu : CV. Adanu Abitama cet. 1.

Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo. 1988. *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern).*Yogyakarta: Liberty.

Taslim, Arifin. 2014. *Metode Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB.

Terry, George Robbert dan L.W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*.

Wijayanti, Irene Diana Sari. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zandri, Lativfah Permata. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama*. Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam Vol. 6 No. 1, hal. 2.

Zahro, Naimah. 2009. *"Pengembangan Ekonomi Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing di pasar global*". Penelitian Strategis Nasional-LPPM UNAI Surabaya.

Peraturan Desa Punggung Lading No 04 Tahun 2018.

Ringkasan Eksekutif BUMDes Punggung Lading.

Wawancara dengan Ibu Dewi.

Wawancara dengan Bapak Rico.

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2112/In.26.3/PP.07/09/2021 23 September 2021
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. : Pimpinan BUMDes Sakato Punggung Lading
Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	: **Andri Yaldi**
NIM	: 3717018
Semester	: IX (sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: ***"Analisis Implementasi Manajemen Pada BUMDes Sakato Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Bisnis Syariah "***
Lokasi Penelitian	: BUMDes Sakato Punggung Lading Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman
Waktu	: 31 Agustus s.d 01 Oktober 2021

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Iz Izmuddin, MA
NIP. 19750303200112100 7

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 473/In.26.3/PP.00.9/11/2020

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : 1. Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Andri Yaldi** NIM. **3717018** tanggal 03 November 2020.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Kontribusi Bumdes Sakato Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Syariah "**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	196404222014112001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/III/b/ Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 November 2020
Dekan,

IIZ IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data diri

Nama	: ANDRI YALDI
Nim	: 3717.018
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 11-08-1998
Alamat	: Pasar Centong Atas, Kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Saudara	: 4 Orang/ Anak ke 3
Hobi	: Travelling, Olahraga, Game Online dan Rebahan.
Email/Ig	: andriyaldi03@gmail.com/@andry.uhuyy

B. Keluarga

Nama Ayah : Anwar Rasyid Chaniago

Nama Ibu : Yunisma

Kakak Pertama : Fitri Nanda Sari A.Md., Par.

Kakak Kedua : Era Fatika Sari

Adik Perempuan: Indah Ramadhanti

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Ishlah Ulujami Jakarta Selatan 2004-2005
2. SDN 01 Ulujami Jakarta Selatan 2005-2009
3. SDS Muhammadiyah 12 Blangkejeren 2009-2011
4. SMPN 01 Blangkejeren 2011-2014
5. SMAN 01 Blangkejeren 2014-2017
6. IAIN Bukittinggi 2017-2021